

OMBUDSMAN BABEL DORONG MITIGASI BENCANA LINTAS INSTANSI HADAPI CUACA EKSTREM

Rabu, 10 Desember 2025 - kepbabel

Ombudsman Babel mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi bencana lintas instansi guna memastikan pelayanan optimal dan tanpa maladministrasi menghadapi potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Pangkalpinang, Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif mendorong pemerintah daerah di wilayah tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana lintas instansi. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa pelayanan penanganan kebencanaan dapat berjalan secara optimal dan terhindar dari praktik maladministrasi. Inisiatif ini menjadi krusial sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan melanda daerah ini.

Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menegaskan bahwa koordinasi antar instansi sangat penting. Menurutnya, pelayanan kebencanaan mencakup berbagai tahapan, mulai dari mitigasi, peringatan dini, respons cepat, hingga distribusi informasi yang akurat kepada masyarakat. Semua tahapan ini merupakan bagian integral dari pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ombudsman Babel secara konsisten mendorong pemerintah untuk memperkuat jejaring kerja sama, menyamakan langkah, dan memastikan bahwa seluruh layanan kebencanaan berjalan efektif. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dan mencegah segala bentuk maladministrasi. Kesiapsiagaan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk dari bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi.

Pentingnya Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanggulangan Bencana

Urgensi koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan bencana menjadi sorotan utama Ombudsman Babel. Shulby Yozar Ariadhy menekankan bahwa pendekatan terpadu diperlukan untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akan menciptakan sistem penanganan bencana yang lebih responsif dan efisien.

Pelayanan kebencanaan yang optimal tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan sinergi dari banyak elemen. Mulai dari penyediaan data dan informasi, kesiapan logistik, hingga edukasi masyarakat, semua harus terintegrasi. "Kami mendorong pemerintah untuk memperkuat jejaring, menyamakan langkah, dan memastikan layanan kebencanaan berjalan optimal tanpa maladministrasi," ujar Shulby Yozar Ariadhy, menegaskan komitmen Ombudsman dalam mengawal proses ini.

Penguatan jejaring dan penyamaan langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan bencana, dari pra-bencana hingga pasca-bencana, dapat terlaksana sesuai standar pelayanan publik. Dengan demikian, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan informasi yang akurat dapat terpenuhi. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Potensi Cuaca Ekstrem dan Kewaspadaan di Bangka Belitung

Berdasarkan informasi terbaru dari BMKG Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi menghadapi berbagai fenomena cuaca ekstrem. Periode 5 hingga 12 Desember 2025 diindikasikan akan terjadi hujan lebat, banjir, gelombang tinggi, angin kencang, dan banjir pesisir atau rob. Kondisi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

BMKG juga menyoroti adanya dinamika atmosfer aktif seperti MJO (Madden Julian Oscillation), Gelombang Kelvin, dan Rossby Ekuator. Fenomena ini secara signifikan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Bangka Belitung. Oleh karena itu, persiapan mitigasi bencana harus diperkuat untuk menghadapi potensi dampak yang lebih besar.

Ombudsman Babel berharap adanya kolaborasi berkelanjutan lintas instansi untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi akan meningkat selama Desember hingga Februari 2026. "Dengan penguatan koordinasi ini, diharapkan masyarakat Bangka Belitung memperoleh layanan perlindungan bencana yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel," kata Shulby Yozar Ariadhy, menekankan pentingnya kesiapsiagaan jangka panjang.

Pengawasan Ombudsman untuk Pelayanan Bencana Akuntabel

Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan kebencanaan berjalan sesuai prosedur dan tanpa maladministrasi. Pengawasan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan mitigasi hingga respons darurat di lapangan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan.

Shulby Yozar Ariadhy menegaskan, "Kami tentunya akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan mencegah maladministrasi termasuk pelayanan kebencanaan." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Ombudsman untuk menjaga integritas dan efektivitas penanganan bencana. Setiap laporan atau indikasi maladministrasi akan ditindaklanjuti demi perbaikan sistem.

Melalui pengawasan yang ketat, Ombudsman berupaya mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan. Hal ini mencakup ketersediaan informasi yang jelas, respons yang cepat, serta distribusi bantuan yang adil dan merata. Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Bangka Belitung yang lebih tangguh dan terlindungi dari ancaman bencana.